



Pemulihan Korban Diprioritaskan, Pengawasan Daycare Diperketat

FAKTA-FAKTA KASUS KEKERASAN DI DAYCARE

Polisi mengungkap kasus dugaan kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresha di Kota Jogja. Peristiwa ini menjadi peringatan serius agar standar perlindungan anak tidak lagi diabaikan.

JUMLAH DAN KONDISI KORBAN

- Dari total 103 anak yang pernah ditilik, sebanyak 53 anak teridentifikasi mengalami kekerasan fisik maupun verbal.
- Sebagian besar korban masih berusia sangat dini, mulai dari bayi hingga anak balita.
- Beberapa anak dilaporkan mengalami luka fisik seperti lebam, bekas cakaran, hingga luka pada bagian tubuh tertentu.
- Selain itu, banyak anak mengalami gangguan kesehatan, termasuk infeksi pernapasan.



Warga melintas di dekat penitipan anak atau daycare Little Aresha yang disegel polisi di Umbulharjo, Jogja, Minggu (26/4). Daycare Little Aresha digerebek polisi terkait dugaan penganiayaan terhadap anak-anak.

KRONOLOGI KASUS

- Kasus ini berawal dari laporan mantan pekerja yang menyatakan laporan anak-pelaku tidak layak.
- Polisi menggerebek daycare pada Jumat (24/4).
- Hasil penyelidikan mengungkap kondisi tempat penitipan yang jauh dari standar. Ruang sempit dan jumlah anak, bahkan ditemukan dugaan tindakan penelantaran dan kekerasan.

JOGJA-Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menajatkan penanganan menyeluruh menyusul dugaan kasus kekerasan anak di sebuah daycare wilayah Umbulharjo, Kota Jogja.

Antig Palar, Yusuf Lamin, & Lupa Sudarrah redaksi@harianjogja.com

Penanganan tidak hanya difokuskan kepada anak korban, tetapi juga orang tua yang terlampaui trauma. Langkah ini diambil karena dampak kasus dinilai luas, mencakup aspek psikologis, kesehatan, hingga tumbuh kembang anak yang membutuhkan penanganan komprehensif.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, Erlina Hidayati, mengatakan setiap anak berpotensi mengalami dampak berbeda, tergantung pengalaman pengasuhan dan durasi di daycare. "Dampaknya bisa beragam, tidak hanya

Pemda DIY mendata ulang seluruh daycare khususnya yang beroperasi di Kota Jogja.

Polresta Jogja menetapkan 13 orang sebagai tersangka.

psikologis, tetapi juga kesehatan dan tumbuh kembang anak. Karena itu diperlukan asesmen menyeluruh," ujarnya, Minggu (26/4).

Asesmen mencakup pemeriksaan psikologis dan fisik untuk memastikan kondisi kesehatan anak sekaligus menjadi dasar penanganan lanjutan. Pemda DIY juga menajatkan layanan pendampingan psikologis bagi orang tua korban yang mengalami trauma. DP3AP2 DIY menggandeng Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) di Kota Jogja, Bantul, dan Sleman, mengingat domisili korban tersebar di sejumlah wilayah. Proses pemuliharaan diperkeratkan berlangsung dalam jangka panjang.

▶ Halaman 10

TIPS MEMILIH DAYCARE

Lakukan Riset Sebelum Memutuskan
 Jangan langsung percaya pada promo atau testimoni menarik. Orang tua wajib melakukan riset, baik lewat media sosial, grup komunitas, maupun dengan mendatangi langsung tempat tersebut. Pilih beberapa daycare dengan ulasan terbaik. Tempai yang punya foto baik cenderung memberikan pelayanan yang baik pula.



Kunjungi Langsung, Amati Suasana
 Jangan hanya percaya foto di media sosial. Datanglah langsung ke daycare pilihan. Perhatikan:
 • Apakah anak-anak dan staf terlihat bahagia?
 • Apakah suasana bersih, sehat, dan aman?
 • Apakah lingkungan sosial yang positif, tanpa bertakan atau kekerasan?
 • Apakah ada bermain aman dan benda berbahaya?

Cek Kualifikasi dan Sertifikasi Pengasuh
 Pastikan setiap pengasuh memiliki sertifikasi pelatihan pertama (PPTG) dan sertifikasi di bidang pengasuhan anak. Sampaikan pengamatan mereka. Jangan ragu meminta bukti sertifikasi saat berkunjung. Pengasuh yang terlatih akan lebih siap menghadapi situasi darurat, seperti anak tersesak atau jatuh.



Wawancara Penyedia, Lakukan Kontak Awal melalui Telepon
 Siapkan pertanyaan seputar jam operasional, ratio pengasuh dengan anak, hingga penanganan darurat. Wawancara telepon akan menghemat waktu sebelum Anda memutuskan untuk berkunjung langsung.



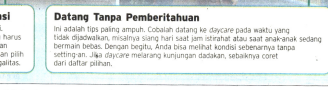
Tanyakan Akreditasi dan Lisensi
 Daycare terbaik pasti memiliki akreditasi resmi. Sebelum orang memiliki standar minimum yang harus dipenuhi. Pastikan tempat penitipan anak pilihan Anda memiliki izin operasional yang sah. Jangan pilih daycare yang tidak bisa menunjukkan bukti legalitas.



Periksa Kebijakan dan Budaya Pengasuhan
 Setiap daycare memiliki budaya pengasuhan yang berbeda. Pastikan sesuai dengan nilai yang Anda terapkan di rumah. Tanyakan soal disiplin apakah mereka menerapkan hukuman fisik? Jam tidur? Menu, jenis menu makanan, jadwal makan, waktu tidur siang, hingga kebijakan anak sakit. Semakin detail pertanyaan, semakin kecil risiko kejadian tak diinginkan.



Datang Tanpa Pemberitahuan
 Ini adalah tips paling ampuh. Cobatan datang ke daycare pada waktu yang tidak dibenarkan, misalnya siang hari saat sedang istirahat atau saat anak-anak bermain bebas. Dengan begitu, Anda bisa melihat kondisi sebenarnya tanpa settingan. Jika daycare memang terjamin dasarnya, sebaiknya coret dari daftar pilihan.



Kesimpulannya, memilih daycare adalah investasi jangka panjang untuk keselamatan dan kebahagiaan anak. Luangkan waktu lebih untuk riset dan inspeksi. Jangan tergiur biaya murah atau lokasi dekat jika standar keselamatan tidak terjamin. Anak Anda layak mendapatkan tempat penitipan yang aman dan penuh kasih sayang.

Sumber: Harian Jogja & Berbagai sumber online | © 2026 Harian Jogja & Penulis, semua hak dilindungi.

Pemulihan Korban...

“Pendampingan psikologis dan trauma healing akan melibatkan Pusat Pembelajaran keluarga di seluruh wilayah terdampak,” kata Erlina.

Untuk penanganan medis, Pemda DIY bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan rumah sakit rujukan. Seluruh biaya penanganan ditanggung pemerintah daerah guna memastikan korban mendapat layanan tanpa kendala biaya.

Pengawasan Diperketat

Selain pemulihan korban, Pemda DIY memperketat pengawasan terhadap seluruh lembaga penitipan anak. Pendataan ulang dilakukan untuk memastikan setiap daycare memiliki izin operasional dan memenuhi standar pengasuhan ramah anak.

Pengawasan mencakup aspek legalitas, kelayakan fasilitas, keamanan lingkungan, standar operasional prosedur (SOP), serta kompetensi tenaga pengasuh.

“Semua aspek diperiksa, mulai dari ruang, keamanan perabot, hingga lingkungan yang mendukung perkembangan anak,” ujar Erlina.

Pemda juga menegaskan daycare tanpa izin tidak diperbolehkan beroperasi dan akan ditindak sesuai ketentuan.

KemenPPPA Turun Tangan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) turut menangani kasus ini dengan mengirim tim untuk asesmen awal dan pendampingan korban.

Plt Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, Indra Gunawan, mengatakan penanganan tidak hanya berfokus pada proses hukum, tetapi juga pemulihan kondisi psikologis anak. “KemenPPPA akan menurunkan tim untuk asesmen dan pendampingan. Kasus ini menjadi perhatian serius,” ujarnya.

Pendampingan melibatkan UPTD PPA, psikolog, serta Dinas Kesehatan, termasuk bantuan hukum bagi keluarga korban.

13 Tersangka

Polresta Jogja menetapkan 13 tersangka dalam kasus ini, terdiri atas pengelola dan pengasuh daycare. Penetapan dilakukan setelah gelar perkara berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi.

Kapolresta Jogja, Eva Guna Pandia, mengatakan para tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak atas dugaan kekerasan fisik, penelantaran, dan perlakuan tidak layak.

“Penegakan hukum tidak hanya menasar pelaku langsung, tetapi juga pihak manajemen yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Penyidik masih mendalami peran masing-masing tersangka, termasuk kemungkinan penambahan tersangka baru.

Data sementara menunjukkan, dari 103 anak yang pernah dititipkan, sedikitnya 53 anak terindikasi mengalami kekerasan. Korban didominasi bayi dan balita, dengan temuan luka fisik hingga gangguan kesehatan seperti infeksi paru-paru.

Kepolisian juga mengungkap kondisi daycare yang tidak layak, dengan ruangan sempit yang menampung puluhan anak.

Perbaikan Sistem

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap lembaga pengasuhan anak. Pemerintah daerah mendorong masyarakat untuk lebih selektif memilih daycare, dengan memastikan legalitas dan standar layanan.

Pemda DIY menegaskan, penanganan kasus ini tidak berhenti pada proses hukum, tetapi menjadi momentum

memperbaiki sistem pengasuhan anak secara menyeluruh, mulai dari penguatan regulasi, pengawasan, hingga edukasi kepada masyarakat.

Perilaku Anak

Sejumlah orang tua korban mengaku terkejut setelah mengetahui kondisi yang dialami anak mereka selama dititipkan. Salah satunya Norman Windarto yang menemukan adanya kesamaan luka antara anaknya dan korban lain.

Menurutnya, luka di bagian tubuh anak justru baru muncul setelah pulang dari daycare, meski pihak pengelola sebelumnya mengklaim luka tersebut sudah ada sejak dari rumah. Tak hanya luka fisik, kekhawatiran juga muncul terkait dampak psikologis. Beberapa orang tua mulai mengaitkan perubahan perilaku anak dengan dugaan kekerasan yang terjadi di tempat tersebut.

Gusti Adi, orang tua lainnya, mengaku baru menyadari kejanggalan setelah kasus ini viral. Ia menuturkan anaknya pernah bermain dengan menirukan adegan mengikat tangan dan kaki, yang sebelumnya dianggap sebagai permainan biasa. “Sekarang jadi muncul pertanyaan, apakah itu hasil dari apa yang mereka alami di sana,” ujarnya.

Sejumlah orang tua juga mengungkapkan adanya gangguan perilaku pada anak, termasuk kebiasaan mengompol pada usia yang seharusnya sudah bisa mandiri. Konsultasi dengan psikolog anak mengarah pada kemungkinan trauma, baik akibat mengalami langsung maupun menyaksikan kekerasan.

Kasus ini mempertegas bahwa dampak kekerasan pada anak tidak hanya terlihat secara fisik, tetapi juga bisa meninggalkan jejak psikologis jangka panjang yang sulit dipulihkan.

Orang tua korban mendesak agar kasus ini disuut tuntas, sekaligus menjadi

momentum evaluasi menyeluruh terhadap izin operasional dan pengawasan fasilitas penitipan anak. Mereka berharap kejadian serupa tidak terulang, mengingat daycare seharusnya menjadi tempat aman bagi anak, bukan justru menjadi ruang yang mengancam tumbuh kembang mereka.

Adapun pengurus daycare memilih bungkam atas kasus ini. Seorang pria yang disebut keluarga korban merupakan salah satu pengurus, memilih diam saat dicecar pertanyaan awak media saat ditemui di Polresta Jogja, pada Sabtu (26/4) siang.

Izin Resmi

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jogja, Budi Santoso, membenarkan daycare tersebut belum memiliki legalitas operasional. Ia menegaskan, pihaknya akan segera mengencarkan sosialisasi terkait perizinan kepada pelaku usaha serupa.

Menurutnya, upaya pembinaan tidak hanya dilakukan oleh DPMPTSP, tetapi juga melibatkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Jogja serta DP3AP2KB Kota Jogja. Sementara itu, penanganan sanksi terhadap pelanggaran izin akan diserahkan kepada aparat penegak hukum. “Ke depan kami akan memperkuat sosialisasi agar pelaku usaha memahami pentingnya izin operasional sebelum menjalankan kegiatan,” ujar Budi.

Ia juga mengungkapkan bahwa hingga kini pihaknya masih melakukan pendataan terkait jumlah daycare yang telah mengantongi izin di Kota Jogja. Data tersebut akan dihimpun melalui sistem internal untuk memastikan akurasi dan menjadi dasar kebijakan lanjutan.

Di sisi lain, Kepala DP3AP2KB Kota Jogja, Retnaningtyas, menyampaikan bahwa langkah penanganan telah dilakukan secara paralel, termasuk

pendampingan terhadap anak-anak dan orang tua yang terdampak. Pendataan terhadap seluruh anak yang sebelumnya dititipkan di daycare tersebut telah dilakukan. Selain itu, pemerintah juga menyediakan layanan pendampingan psikologis serta bantuan konseling hukum bagi keluarga. “Pendampingan ini penting agar anak-anak tetap mendapatkan perlindungan dan rasa aman pascakejadian,” jelasnya.

Retnaningtyas menegaskan bahwa hasil pengecekan lintas instansi menunjukkan daycare tersebut memang belum memiliki izin resmi. Oleh karena itu, pemerintah kini melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh tempat penitipan anak di Kota Jogja.

Pendataan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari kader di tingkat kelurahan hingga koordinasi dengan Mal Pelayanan Publik dan dinas terkait. Langkah ini diharapkan mampu memetakan kondisi riil di lapangan, termasuk mengidentifikasi daycare yang belum memenuhi ketentuan.

Selain itu, operasional daycare Little Aresha bersama unit taman kanak-kanak yang berada dalam satu yayasan untuk sementara dihentikan karena telah masuk dalam proses hukum. Pemkot Jogja juga memastikan tidak mengabaikan keberlangsungan pendidikan dan pengasuhan anak-anak yang terdampak. Pemerintah akan berkoordinasi dengan orang tua untuk mencari solusi terbaik, termasuk kemungkinan pemindahan ke lembaga lain yang telah memiliki izin resmi.

Kasus ini menjadi momentum bagi Pemkot Jogja untuk memperketat pengawasan sekaligus meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas dan standar pelayanan, demi menjamin keamanan serta kesejahteraan anak-anak di Kota Jogja. (Stefani Yulindriani)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan			

Yogyakarta, 18 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005